

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Peranan Pemerintah

Definisi paling umum dari peran seseorang dalam proses tertentu adalah "hadiran" dalam konteks definisi proses itu. Selain itu, Alvin L. Bertrand menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "peran" adalah jumlah uang yang bersedia dipertaruhkan oleh seseorang dengan pangkat atau keadaan tertentu yang bersedia berpisah. Margono Slamet mendefinisikan peran sebagai bahaya yang dihadapi seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakannya. Menurut pernyataan Astrid S Susanto, kehidupan seseorang ditandai dengan dinamisme negara atau penggunaan orang dan kewajibannya, atau sebagai subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau orang tertentu. Dalam pekerjaan ini, proses mengerjakan pekerjaan rumah dikenal dengan peranan (status). bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Karena satu orang dan yang lainnya sama-sama "saling tergantung", tidak ada status peran tanpa dan tidak ada status peran tanpa. Tiga aspek kepribadian seseorang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Dalam konteks masyarakat manusia, norma-norma yang dikaitkan dengan kedudukan atau kedudukan seseorang disebut peran
2. Peran adalah konsep ikhwal yang dapat digunakan oleh individu dalam suatu masyarakat; dan juga bisa digunakan.

3. Peran dapat digambarkan sebagai anggota penting dari struktur sosial masyarakat.

Karena fungsi peran secara keseluruhan peranan dapat digunakan untuk menghipnotis seseorang ketika berperilaku, sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Peran yang diasumsikan: bagaimana melakukan penelitian dengan cara terbaik, menurut persepsi masyarakat umum. Peran ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan harapan masyarakat, karena masyarakat mengharapkannya dilakukan dengan hati-hati dan metodis. Jenis peran ini selain jenis peran lainnya, seperti hakim, protokol diplomatik, dan sebagainya; dan banyak lagi.
2. Disesuaikan (peran nyata), seperti cara di mana peran yang sebenarnya dilakukan. Tingkat fleksibilitas yang lebih besar diberikan oleh pedaksana ini, yang dapat disesuaikan dengan situasi dan keadaan apa pun. Meskipun tindakan yang diusulkan mungkin tidak sesuai dengan keadaan saat ini, publik mungkin khawatir dengan meningkatnya ketegangan yang muncul (Narwoko. 2007).

Menurut teori keabadian dalam hubungan manusia, ada skenario atau keabadian yang telah dibantah oleh masyarakat umum yang menentukan apa dan bagaimana keabadian setiap orang selama pertemuan sosial.

Sebuah teori partisipasi politik yang didasarkan pada politik analitik dapat dilihat dalam politik antar negara atau antar dunia yang sedang berlangsung. Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua alat yang berguna untuk analisis kebijakan. Sebagai contoh, ia membedakan antara peran aktor politik dengan peran aktor lain, seperti peran yang dimainkan oleh aktor politik dan aktor atau institusi lain. Dengan menyatakan hal ini, dia menyiratkan bahwa politisi pada umumnya selalu berusaha untuk memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan standar perilaku yang diterima secara umum di saat mereka berada. Sementara itu, ia menjelaskan peran institusi dalam kaitannya dengan teori perilaku, di mana model teor peran mengungkapkan risiko yang membuat suatu kegiatan tertentu menjadi sebuah institusi. Individu juga ditampilkan sebagai makhluk yang rentan terhadap agresi dan permusuhan terhadap perilaku orang lain dalam peran kerangka berbasis teori.

Pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dan berasal dari kata "gubernur" dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan sebagai "padanan kata" atau "pengemudi". Akibatnya, biasanya digunakan untuk menggambarkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Istilah "goupernance" (pejabat kerajaan) digunakan di Prancis abad ke-14 untuk

menggambarkan aparatur "taat", maka pemerintah juga dapat disebut sebagai aparat "taat" yang menjalankan tugasnya dengan setia.

Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang diciptakan untuk menyatukan cita-cita masyarakat suatu negara, untuk membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menyelesaikan tugas ini, Pemerintah diberi mandat untuk menggunakan jumlah daya yang tersedia untuk umum. Pertambangan eksplorasi dapat dilakukan oleh pemerintah, atau dapat diminta oleh pihak lain untuk melaksanakannya, serta sejenisnya, atas nama kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks interdependensi sosial, perbedaan antara pemerintah dan institusi lain terlihat jelas: pemerintah memiliki kekuatan paksaan yang sah, sedangkan institusi lain memiliki sukarela interalasi, yang oleh Huges disebut sebagai "kekuatan paksaan" (voluntary). Sebagai akibat dari adanya sanksi hukum yang diambil oleh pemerintah untuk membela dan menegakkan nama bangsa dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan, muncul fenomena "kekuasaan yang memaksa" (Setiyono, 2021).

Sebagai bagian dari laporannya tentang pembangunan, Bank Dunia menjelaskan kepada kita bahwa pemerintah memiliki enam "Tugas Mendasar", yang meliputi: (1) menetapkan landasan hukum, (2) memelihara lingkungan kebijakan yang tidak menyimpang, termasuk stabilitas makroekonomi; (3) pelaksanaan investasi dalam pelayanan dan infrastruktur sosial dasar (melindungi lingkungan).

## **2.2 Konsep Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga**

Sesuai dengan peraturan Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Kepegawaian Ikatan Teknik Batam dan Perda Batam No. 57 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan ketenagakerjaan pemuda dan atletik masing-masing. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kemampuan untuk membantu Walikota dalam meluncurkan Urusan Pemerintahan yang merupakan bahaya terbesar yang dihadapi pemuda dan daerah terkait olahraga di negara ini, di samping mandat lain yang diberikan kepada Walikota.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam memiliki fungsi sebagai berikut saat menyelesaikan tugas yang ada:

1. Kebijakan Perumusan Bidang Rehabilitasi dan Raga
2. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan hubungan internasional;
3. Evaluasi dan perencanaan di bidang hak asasi manusia dan kesetaraan
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdamaian dan konflik bersenjata
5. Fungsi lain yang diberikan oleh walikota dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi terkait;

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Departemen, salah seorang Kepala Departemen diangkat oleh Walikota melalui Sekretaris Negara. Penting bagi pemerintah Kota Batam untuk memiliki visi dan misi yang terintegrasi. Tidak diragukan lagi: Dewan Sesepeuh Batam mendukung Dewan Pemerintah Batam dalam upaya mereka untuk meluncurkan rencana strategis mereka.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan.

**Tabel 2.1 Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam**

No	Divisi	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
1	<b>Bidang Pemuda</b>			
a.	Seksi Bina Kewirausahaan	melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemuda lingkup Bina Kewirausahaan.	a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina kewirausahaan; b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup bina kewirausahaan; c. pelaksanaan pengendalian lingkup bina kewirausahaan; dan d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kewirausahaan.	a. memproses dan menyusun bahan rencana program  kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan  perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Bina  Kewirausahaan yang berbasis kinerja sebagai  pedoman pelaksanaan tugas;  b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Bina Kewirausahaan. c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Bina Kewirausahaan;

			<p>d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;</p> <p>e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di Bidang Kewirausahaan;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan pemuda berwirausaha dan berkarakter mandiri;</p> <p>g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani</p> <p>Pimpinan;</p> <p>h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Bina Kewirausahaan;</p> <p>i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;</p> <p>j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Bina Kewirausahaan;</p>
--	--	--	---



				<p>k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Bina Kewirausahaan; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>
b.	Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemuda lingkup Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan</p>	<p>a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan;</p> <p>c. pelaksanaan pengendalian lingkup kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan; dan</p> <p>d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan</p>	<p>a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan;</p> <p>c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan;</p>

			<p>d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;</p> <p>e. memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang kelembagaan, kemitraan dan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;</p> <p>f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan.</p> <p>g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan;</p> <p>h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;</p> <p>i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan;</p>
--	--	--	---

				<p>j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan; dan</p> <p>k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
c.	Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keuangan	<p>melaksanakan sebagian tugas</p> <p>Kepala Bidang Pemuda lingkup Kepemimpinan,</p> <p>Kepeloporan dan Keuangan</p>	<p>a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup kepemimpinan, kepeloporan dan keuangan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kepemimpinan, kepeloporan dan keuangan;</p> <p>c. pelaksanaan pengendalian lingkup kepemimpinan, kepeloporan dan keuangan; dan</p> <p>d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kepemimpinan, kepeloporan dan keuangan.</p>	<p>a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi</p> <p>Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keuangan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi</p> <p>Kepemimpinan, Kepeloporan dan Keuangan;</p> <p>c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Kepemimpinan,</p>

	<p>Kepeloporan dan Kejuangan;  d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan  sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;  e. melaksanakan pembinaan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan kepemudaan;  f. melaksanakan pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA);  g. melaksanakan pembinaan pemuda berjiwa nasionalisme dan patriotisme;  h. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani  Pimpinan;  i. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi  Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan;  j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;</p>
--	---

				<p>k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data</p> <p>serta penyajian data hasil kegiatan Seksi</p> <p>Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan;</p> <p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
2	<b>Bidang Olahraga</b>			
a.	<p>Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas</p> <p>Kepala Bidang Olahraga lingkup Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan</p>	<p>a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemberdayaan, prestasi, organisasi dan kemitraan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan, prestasi, organisasi dan kemitraan;</p> <p>c. pelaksanaan pengendalian lingkup pemberdayaan, prestasi, organisasi dan kemitraan; dan</p>	<p>a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi</p> <p>Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p>

		<p>d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan, prestasi, organisasi dan kemitraan.</p>	<p>b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;</p> <p>c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;</p> <p>d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;</p> <p>e. melaksanakan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi di Bidang Olahraga;</p> <p>f. melaksanakan identifikasi bakat dan potensi pelajar dan masyarakat dalam olahraga, dan pengembangan olahraga unggulan Daerah;</p> <p>g. melakukan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;</p> <p>h. menyelenggarakan kompetisi olahraga;</p> <p>i. menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi</p>
--	--	---	--

insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi;

j. melakukan pengembangan dan pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) olahraga

sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;

k. melaksanakan pembinaan cabang olahraga prestasi

tingkat Daerah;

l. melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknis

olahraga;

m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan

tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya

sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani

Pimpinan;

n. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi

Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan

Kemitraan;

o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan

Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data

				<p>Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah</p> <p>Provinsi dan Pemerintah Pusat;</p> <p>k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data</p> <p>serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Olahraga</p> <p>Rekreasi;</p> <p>l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Olahraga</p> <p>Rekreasi; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>
c.	Seksi Pembinaan dan Pelatihan	<p>melaksanakan sebagian tugas</p> <p>Kepala Bidang Olahraga lingkup Pembinaan dan Pelatihan.</p>	<p>a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pembinaan dan pelatihan;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pembinaan dan pelatihan;</p> <p>c. pelaksanaan pengendalian lingkup pembinaan dan pelatihan; dan</p> <p>d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>	<p>a. memproses dan menyusun bahan rencana program</p> <p>kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan</p> <p>perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi</p> <p>Pembinaan dan Pelatihan yang berbasis kinerja</p> <p>sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</p> <p>b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi</p> <p>Pembinaan dan Pelatihan;</p>



		<p>pelaksanaan lingkup pembinaan dan pelatihan.</p>	<p>c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Pembinaan dan Pelatihan;</p> <p>d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;</p> <p>e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap para pelatih dan wasit cabang olahraga;</p> <p>f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;</p> <p>g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pembinaan dan Pelatihan;</p> <p>h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;</p> <p>i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data</p>
--	--	---	--

				serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan; j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fung
--	--	--	--	---

Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam memiliki fasilitas sebagai berikut:

1. Persiapan acara seperti kompetisi olahraga, seperti Olimpiade dan Paralimpiade;
2. perayaan hari rakyat Olympiada;
3. Fokus pada perencanaan, koordinasi, dan evaluasi di bidang rekrutmen, retensi, dan retensi anak, perempuan, dan laki-laki, serta pengembangan program pengasuhan anak dan pendidikan anak usia dini;
4. Upaya pelaksanaan kebijakan pembinaan dan perluasan keolahragaan, termasuk implementasi permasalahan, peningkatan kinerja, dan koordinasi kegiatan keolahragaan.
5. Sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
6. Perlu dilaksanakan kegiatan perzinan pemberian perizinan di bidang kesehatan dan kebugaran, serta di bidang gulat.
7. Hubungan antara Pemerintah dan Pemuda.

8. Persiapan Panti Pemuda, Kung Fu, dan Olympus;
9. Pembangunan tingkat makro di seluruh wilayah di bidang kesehatan dan pendidikan;
10. SDM, sebuah organisasi yang berpotensi berguna di bidang pemeliharaan perdamaian dan kepolisian hak asasi manusia;
11. Penyelidikan di bidang kesehatan dan kebugaran yang meliputi seluruh kota Jakarta;
12. Persiapan undang-undang untuk membantu dalam menikmati olahraga dan rekreasi;
13. Walikota wajib menerapkan dan memelihara standar pelayanan minimal di bidang transportasi dan rekreasi untuk wilayah negara bagian bawah.
14. Pembuatan rekomendasi di bidang olah raga dan rekreasi untuk daerah setempat;
15. kompetisi internasional di bidang olahraga dan pemuda atas nama negara;
16. Penyiapan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan;
17. Penyelidikan terhadap pelaksanaan semua peraturan yang berlaku di bidang olahraga dan rekreasi, serta berlakunya semua peraturan di bidang olahraga dan rekreasi.
18. Penyelenggaraan pengawasan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

Diyakini bahwa tiga prinsip dasar Pemuda, Olahraga, dan Pingat saling terkait dalam olahraga. Sebagai tindak lanjut, berikut beberapa penjelasan dari ketiga peran pertama:

### **a. Teori Pembinaan**

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah proses di mana orang memperoleh kemampuan tertentu untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Karena proses ini melibatkan beberapa tujuan organisasi, pengembangan mungkin cepat atau ekstensif.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah proses di mana orang memperoleh kemampuan tertentu untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Karena proses ini melibatkan beberapa tujuan organisasi, pengembangan mungkin cepat atau ekstensif. Ivancevich (2008) mendefinisikan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pekerjaan di masa depan.

Ivancevich mendefinisikan pembinaan sebagai proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja karyawan atau kelompok untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan kerja saat ini. Pembinaan yang berorientasi ke masa depan dan membantu pegawai menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) spesifik untuk berhasil dalam pekerjaan. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan, mendanai, merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mencapai hasil yang maksimal.

Adapun fungsi-fungsi pembinaan yakni, menerapkan teori, membuat dan menggunakan strategi dan taktis dengan menerima rencana dari staf untuk memudahkan perencanaan operasional, memudahkan kunjungan, misi, dan sasa

Pembinaan juga menyediakan dan mempertahankan standar dalam bentuk kebijakan, prosedur, mengatur dan mengatur, membuka disiplin dalam setiap kegiatan, memudahkan dan mempertahankan hubungan interpersonal, memberikan kesempatan untuk konseling, alokasi Wewenang.

Tujuan umum adalah untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan secara rasional, dan untuk menge (pemimpin).

Mangkunegara (2005:76) menjelaskan komponen bangunan sebagai::

1. Tujuan pembangunan harus jelas dan terukur.
2. Pengembang profesional.
3. Bahan pengembangan dan pertumbuhan harus sesuai dengan tujuan.
4. Peserta dalam pembangunan harus memenuhi persyaratan.

Agar program-program pembangunan menjadi efektif dan menguntungkan, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sistematis harus dilakukan. Ada tiga tahap pengembangan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

#### **b. Teori Pendanaan**

Umumnya, setiap organisasi membutuhkan uang. Uang mungkin berasal dari sumber internal atau eksternal. Kebutuhan dana perusahaan seringkali merupakan campuran dana jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Yuesti dan Kepramareni (2019:7), pendanaan adalah keputusan tentang dana mana yang akan digunakan, bagaimana mengalokasikannya, dan apakah organisasi akan menggunakan dana dari dalam atau luar organisasi.

Murtini (2008:98) mengatakan keputusan pendanaan adalah bagaimana suatu organisasi dapat mendanai operasinya secara optimal dan bagaimana mempertahankan pendanaan yang optimal.

Di Dinas Pemuda dan Olahraga, pengeluaran disebut budgeting. Menurut Zulkifli (2018), Alokasi Dana adalah rencana kuantitatif berkala berdasarkan program yang telah disetujui.

Anggaran (budget) adalah rencana tertulis untuk kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satu mata uang. Menurut Nafarin (2011:22), jenis anggaran antara lain:

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari:
  - a. Anggaran variabel didasarkan pada kapasitas kegiatan tertentu dan dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kegiatan atau tugas.
  - b. Anggaran tetap yang didasarkan pada kapasitas kadang-kadang disebut anggaran statis.
2. Berdasarkan pada jangkauan waktu, anggaran dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Jangka pendek anggaran adalah anggaran yang dihitung berdasarkan periode waktu terpendek dalam satu tahun kalender. Untuk memastikan jadwal kerja Anda sesuai jadwal, Anda perlu memiliki alokan Jangka Pendek.
  - b. Dalam hal ini, anggaran jangka panjang adalah anggaran yang direncanakan untuk digunakan lebih dari satu tahun. Untuk memenuhi kebutuhan investasi baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diperlukan anggaran jangka panjang untuk pembentukan anggaran jangka pendek.
3. Berdasarkan fungsinya, anggaran dibagi menjadi dua:

- a. Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan dapat disesuaikan dengan kondisi, anggaran belanja (apropriasi) merupakan salah satu jenis anggaran.
- b. Anggaran anggaran dirancang untuk mengetahui apakah output moneter setiap proyek tidak melebihi anggaran perusahaan pemiliknya.

Selain itu, menurut Garisson dan Noeran (2013: 402), Anggaran adalah penilaian retrospektif terhadap penggunaan dan penyalahgunaan aset keuangan dan aset lainnya selama periode waktu tertentu. Tendi Haruman (2010: 6) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan jumlah uang yang akan dibelanjakan dan berfungsi sebagai sumber informasi untuk jangka waktu tertentu. Siklus anggaran memiliki empat tahapan yang telah dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:70) sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Untuk itu perlu melaksanakan tugas persiapan anggaran dengan melaksanakan tugas pengeluaran sebesar-besarnya pendapatan dasar yang tersedia, yang bergantung pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Mengingat hal ini, penting untuk diingat bahwa sebelum menyetujui rencana pembayaran, Anda harus menyelesaikan penyelidikan pra-pembayaran terlebih dahulu.

2. Tahap Ratifikasi

Ini adalah langkah yang menggoyahkan proses politik yang sudah goyah. Germa eksekusi memegang standar integritas dan ketangguhan mental yang tinggi. Itu penting karena dalam sesi ini, cabang eksekutif harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjawab setiap pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan oleh legislator dan memberikan argumen rasional untuk mendukung posisi mereka.

### 3. Tahap ketiga implementasi

Manajer keuangan sektor publik memberikan perhatian khusus pada sistem informasi keuangan sektor publik dan sistem untuk mengelola uang. Akibatnya, pengelola uang publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang fleksibel dan dapat diandalkan untuk keperluan menghitung dan mendokumentasikan peristiwa moneter yang akan datang, dan bahkan untuk periode waktu mendatang ketika sistem moneter akan digunakan untuk pertama kalinya. waktu.

### 4. Langkah Proses Evaluasi

Tahap ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain tahapan persiapan, pengesahan, dan pelaksanaan anggaran operasional, serta tahapan pelaporan dan evaluasi akuntabilitas. Seharusnya tidak ada masalah jika implementasinya telah didukung oleh sistem akuntansi dan manajemen yang berfungsi dengan baik, sehingga diharapkan tahap evaluasi dan pelaporan tidak akan bermasalah.



### **c. Teori Kebijakan**

Kebijakan atau pemberlakuan terkait dengan persiapan, diseminasi, dan evaluasi keputusan, implementasi keputusan, dan evaluasi dampak implementasi keputusan terhadap banyak orang yang menjadi pendukung kebijakan (kelompok target). Ini adalah alat atau perlengkapan yang dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan benda dari atas ke bawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, esensi kebijakan adalah seperangkat keyakinan dan perilaku yang konsisten di antara para peserta yang melampaui keyakinan dan perilaku individu individu. Reward dan punishment dapat diberikan dengan berbagai cara (Marzali, 2012). Dalam arti luas, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan berorientasi pada tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Ada banyak orang yang terpengaruh oleh keputusan ini, dan ini adalah salah satu cara mereka terpengaruh. Sebagai upaya terakhir, kebijakan tersebut akan dibongkar dan dimusnahkan untuk memastikan bahwa banyak orang yang menjadi sasaran (target group) akan berperilaku sesuai dengan tujuan dan asumsi kebijakan tersebut (Marzali, 2012).

Ada beberapa sudut pandang tentang subjek hukum yang telah diungkapkan oleh mereka yang telah mempelajarinya. Ada bukti yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sering diajukan selama wawancara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang masalah yang telah diangkat oleh organisasi yang telah menerapkan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi, serta tentang prosedur, strategi, dan jadwal yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi tersebut.

Sebagai contoh, pertimbangkan gagasan untuk mengawasi siapa yang Anda hadapi setiap hari. Selama akhir pekan terakhir ini, menjadi lebih umum bagi pejabat pemerintah dan pemimpin nasional untuk menggunakan gaya kebijakan ini sehubungan dengan pernyataan dan pidato resmi.

Setiap rencana yang telah dikembangkan oleh pejabat pemerintah tidak akan berlaku sampai rencana itu dilaksanakan. Sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari penciptaan tayangan itu sendiri adalah eksekusinya, karena tanpanya, penampil hanya akan menjadi pendorong atau rencana bagus yang bergerak cepat di udara. Karena Sebagai salah satu fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan audit internal dalam bentuk apapun dianggap membuang-buang waktu.

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Tahir, 2011).

### **2.3 Meningkatkan Potensi Generasi Muda**

Pemuda adalah pribadi yang bila dilihat secara fisik dan emosional sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Artinya Pemuda merupakan sumber pertumbuhan manusia, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sebagai generasi penerus generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut mereka yang berusia 10-24 tahun sebagai "orang muda", sedangkan mereka yang berusia 10-19 tahun disebut sebagai "adolesceneae" atau "remaja." Dalam definisi kedua, "pumda" adalah seseorang yang "dinamis", meskipun dia juga "bergejolak" dan "optimis", tetapi tidak memiliki keadaan emosi yang stabil (Mulyana, 2012).

Istilah "pemuda" mengacu pada orang-orang yang berusia antara 15 dan 30 tahun; secara biologis, mereka adalah orang-orang yang sudah mulai mengungkapkan perasaannya tentang dunia, seperti perubahan kesehatan fisik; dan secara religius, mereka adalah orang-orang yang sudah memasuki fase "akil baligh", yang ditandai dengan kebingungan tentang dunia dan pengaruhnya terhadap perempuan, seperti mimpi bahasa dan pengaruhnya terhadap laki-laki.

Dalam menghadapi suatu masalah, mentalitas seseorang lebih dewasa dari sebelumnya. Jika Anda akan menggunakan metode ini, Anda harus melakukannya dengan seseorang yang memiliki pengalaman dalam menangani masalah yang Anda hadapi, apakah itu teman atau anggota keluarga. Ketika sekelompok orang memiliki kemampuan untuk menangani krisis, mereka akan memiliki rasa sejahtera yang dapat ditransfer ke satu orang melalui penggunaan tangguh.

Dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga DPRD Provinsi Riau, misi juga ditegaskan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan, sekaligus sebagai pengingat visi yang telah dicanangkan sebelumnya. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pemangku kepentingan utama (Stakeholder) memahami dan mampu mengartikulasikan visi serta tujuan dan proses organisasi sesuai dengan pernyataan ini. Misi harus dicocokkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi seperti ini :

- 1) "Meningkatkan sumber tenaga kerja yang kreatif dan mampu"

Misi ini bertujuan agar pemuda ikut, berpartisipasi, dan berperan aktif diberbagai bidang, sehingga pemuda-pemuda Kepulauan Riau dapat bersaing, memberdayakan, dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki, dengan nantinya akan menja

2) "Menciptakan pemuda yang dewasa, berjiwa muda tanpa meninggalkan budaya melayu"

Misi ini bercita-cita untuk pemuda yang mampu membentuk, mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, memiliki rasa cinta tanah air, bangga akan negeri sendiri mencintai budaya melayu, dan sikap yang kritis dan idealis sert

3) "Tingkatkan pendapatan perjudian melalui promosi"

Misi ini adalah mewujudkan pemberdayaan keolahragaan dengan cara pembudayaan olahraga didalam kehidupan sehari-hari dimulai dari diri sendiri, keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat luas dengan menggunakan lintas sektor.

4) "Buat atlet yang tahan lama dan terkenal"

Misi ini berarti mewujudkan prestasi dibidang olahraga dalam tingkat nasional dan regional dengan berbagai upaya mulai dari pembibitan olahragawan yang dihadiahkan, pengembangan kemampuan atlet serta peningkatan kemampuan yang dilakukan secara sistematis,

5) "Meningkatkan kuota pelatih nasional untuk prestasi olahraga"

Misi ini berarti menciptakan dan mewujudkan pelatih olahraga yang bertaraf nasional dalam pembangunan olahraga. Segera, pelatihan ini akan menciptakan atlet berkualitas tinggi.

6) "Menyediakan fasilitas pemuda dan olahraga standar nasional dan internasional"

Misi ini bercita-cita menyediakan sarana pemuda dan olahraga berstandar nasional dan internasional yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat luas untuk membangun kejayaan olahraga kepri, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda kepri.

Generasi muda yang bergabung dalam organisasi dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Memiliki potensi dan karakteristik seperti:

a) Idealis, kritis, dan bertanggung jawab

Secara sosiologis, kaum muda masih relatif abai terhadap kebutuhan sosial, sehingga mereka dapat melihat kesenjangan secara lebih objektif dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu kaum muda dapat menemukan cara-cara yang lebih baik untuk mengimplementasikan tatanan. Berpikir idealis dan kritis harus diimbangi dengan pengetahuan dan tanggung jawab.

b) Dinamisme dan kreativitas

Karena idealisme ini, generasi ini memiliki potensi dan kreativitas untuk beradaptasi dengan perubahan, memperbaiki kelemahan, atau menciptakan ide-ide baru.

c) Bankir yang berani mengambil risiko

Perubahan dan promosi membawa risiko, tetapi harus diambil untuk mencapai pertumbuhan. Generasi muda dapat bergabung dengan bisnis yang berisiko. Pengetahuan, kepemimpinan, dan keterampilan kaum muda memberikan pengambilan risiko yang berkualitas tinggi.

d) Optimisme dan keberanian

Kegagalan tidak membunuh keberanian Optimisme dan tekad anak muda mendorong mereka untuk sukses

e) Terdidik

Semua generasi muda memiliki kesempatan mengajar yang lebih banyak karena kesempatan belajar yang lebih banyak daripada generasi yang lebih tua.

f) Persatuan dan persatuan bangsa

Keanekaragaman generasi muda adalah cerminan masyarakat Indonesia, jika ditangani dengan cepat dapat menjadi penghambat. Sebaliknya, keanekaragaman Indonesia dapat menjadi dinamis dan kreatif jika ditempatkan dalam kerangka integrasi nasional berdasarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhineka Tunggal Ika. Setiap generasi muda dapat didorong untuk menunjukkan potensi terbaiknya dan bertanggung jawab atas pembangunan nasional.

Patriotisme, nasionalisme

g) Kebanggaan, cinta, dan patriotisme kaum muda harus ditumbuhkan. Hal ini akan memperbaharui tekadnya untuk membela negaranya dari segala ancaman.

Dengan ketabahan dan tekad, kaum muda harus ikut menjaga keamanan dan pertahanan negara.

h) Fisik Kuat dan jumlah banyak

Data sosial dan demografi dapat digunakan dalam proyek pembangunan skala besar, terutama di daerah pedesaan.

i) Ksatria

Kemurnian idealisme, keberanian, semangat pengabdian dan pengorbanan, serta tanggung jawab sosial yang tinggi merupakan unsur-unsur yang harus dikembangkan menjadi sikap. s) Ksatria di kalangan anak muda Indonesia sebagai penggerak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan bangsa.

j) Keterampilan pengetahuan dan teknologi.

Generasi muda dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Etika dan moral Pancasila yang tinggi harus ditanamkan. Tanpa bukti, sains dan teknologi memajukan determinisme.

Di banyak departemen pemerintah dan lembaga non-departemen, sistem yang seragam untuk melatih kaum muda diperlukan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Presiden membentuk Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda dengan Keppres No. 23 Tahun 1979.

Badan koordinasi ini menetapkan pembinaan dan pengembangan generasi muda, sebagaimana sudah dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti tertuang dalam pasal Generasi Muda a dan b ditemukan 9 butir program yaitu:

1) Kepemimpinan dan keterampilan

Latihan kepemimpinan dan keterampilan harus diarahkan sedemikian rupa untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan mental spiritual, kemampuan penyusunan rencana kerja, serta pengorganisasian dan



pengolahannya. Persiapan kader-kader pembangunan yang terampil diharapkan mampu membuat atau memelihara lokasi kerja. Suatu latihan keterampilan yang menggunakan kurikulum yang tepat, pelatihan yang teratur akan melahirkan tenaga kerja yang diberikan sertifikat yang layak. Sertifikat-sertifikat seperti ini harus diatur agar yang memilikinya mendapat prioritas pekerjaan atau jika ingin membuat tempat kerja mendapatkan bantuan. Untuk itu, diperlukan paket kurikulum dan upaya pengembangan keterampilan.

## 2) Kesegaran jasmani dan daya kreasi

Materi program ini sebagian besar didistribusikan melalui turnamen olahraga (seni budaya). Aktivitas keolahragaan dalam konteks pembinaan generasi muda mewujudkan kesegaran jasmani dan ditutup untuk menimbulkan sportivitas, kejujuran, dan kesetiakawanan. KONI akan mengembangkan olahraga papan atas. Pertemuan olahraga bagi generasi muda dipolakan sesuai penjaluran organisasi pemuda yang ada, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (POPSI) untuk para pelajar.

## 3) Patriotisme dan idealisme

Kemajuan sosial dan sejarah mempengaruhi naik turunnya patriotisme. Oleh karena itu, patriotisme saat ini tidak dapat dibandingkan dengan patriotisme pada masa kemerdekaan Indonesia karena keduanya berbeda, begitu juga dengan idealisme seseorang. Usaha mempertebal

semangat kebangsaan harus senantiasa diperbaharui melalui pariwisata pemuda, apresiasi budaya dan sejarah, serta pengembangan kelompok pecinta alam. Hal ini akan membantu usaha mewujudkan nilai-nilai tersebut.

4) Menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara

Sebagai generasi baru, kita harus mengingat hal ini agar nilai-nilai inti suatu bangsa dihormati, dikembangkan, dan dipersatukan. Pendidikan politik dalam pelaksanaan demokrasi pancasila, penghayatan dan pengamalan pancasila, dan pelaksanaan UUD 45 akan dilaksanakan terus menerus melalui latihan kepemimpinan, diskusi, forum ilmiah dan lain-lain.

5) Kepribadian dan budi pekerti luhur

Indonesia adalah negara yang religius dan cinta Tuhan. Telah menghasilkan kepribadian yang mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi seperti toleransi, cinta kasih terhadap sesama, menghargai perasaan orang lain, dan sebagainya. Nilai-nilai moral yang agung ini harus dikembangkan terus sehingga kelak, wajah pribadi bangsa ini harus tetap menonjol. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan agama, adalah penting. Selain pendidikan formal, orang tua dan guru memegang peranan penting.

6) Penciptaan iklim yang sehat

Terciptanya iklim yang sehat untuk memungkinkan kreativitas generasi muda dan berkembang secara wajar dan bertanggung jawab, tidak datang dari satu arah saja, namun masing-masing unsur dalam masyarakat termasuk generasi mudanya bertang.

7) Peningkatan fungsi wadah pembinaan generasi muda

fungsi dan peningkatan pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti lainpramuka, organisasi olahraga dan lain-lain. Fokus pada penerapan aturan dan mengelompokkannya ke dalam fase pengembangan yang telah ditentukan.

#### 8) Peningkatan sarana dan fasilitas

Usaha peningkatan dan penambahan sarana dan fasilitas bagi pengembangan kepemudaan dirasakan kebutuhannya karena masih kurangnya sarana/fasilitas yang ada dari berbagai sarana dasar bagi pengembangan kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa Filipina, oleh karena itu pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program kepemudaan.:

- a. Program pemberdayaan pemuda melalui organisasi kepemudaan
- b. Program yang memberikan kebebasan kepada generasi muda untuk berkreasi dan melakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga mereka dapat melihat diri mereka sebagai pemimpin masa depan negara
- c. Program yang mendorong Remaja Masjid di setiap kecamatan menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan pengabdian masyarakat.
- d. Program pembinaan generasi muda melalui pelatihan, pesantren kilat, keterampilan, kewirausahaan untuk menciptakan generasi beriman, bertaqwa, terampil, dan mandiri, menghindari krisis akhlak, dan penyalahgunaan narkoba.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Muhajir Amsar  2018	Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Dalam Membentuk Pemuda Yang Inovatif Di Provinsi Aceh	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis data menunjukkan peran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh sudah sangat membantu dalam membentuk pemuda yang inovatif dengan melatih pemuda-pemuda untuk mandiri, berdaya saing tinggi, cepat tanggap serta berguna bagimasyarakat namun masih terbatas anggarannya untuk bisa mencapai seluruh pemuda Aceh.
2	Rifaldi Pinilas, Ronny Gosal, Ventje Kasenda  2017	Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud dari hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam partisipasi yaitu kurangnya pembinaan dan motivasi dari aparat desa, kurangnya kemampuan dan keahlian para pemuda, kurangnya kesadaran

				<p>pemuda tentang pembangunan, dan kurangnya pendidikan, selanjtnya partisipasi generasi muda dalam pengawasan menunjukkan tingkat partisipasi generasi muda belum ikut terlibat dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Dikalangan generasi muda lebih cenderung melakukan aktifitasnya masing-masing. Yang seharusnya generasi muda ikut serta melakukan pengawasan di dalamnya.</p>
3	<p>Ade Lutfita Ningtyas, Nurul Umi Ati, Suyeno</p> <p>2019</p>	<p>Efektifitas Dispora Dalam Pemberdayaan Generasi Muda yaitu adanya dukungan penuh dari pemerintah KotaMalang Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Upaya yang sudah dilakukan Dispora dalam pemeberdayaan generasi muda yaitu mengadakan sosialisasi kepada generasi muda dan mengadakan seleksi pemuda pelopor. Sedangkan faktor pendukung dari Sedangkan faktor penghamabat yaitu kurangnya respon dari masyarakat atau pemuda</p>
4	<p>Pratiwi Ramlan</p>	<p>Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Potensi</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran</p>

		Generasi Muda di Desa Tuncung		terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna desa Tuncung diharapkan diaktifkan kembali agar pemuda-pemudi di DesaTuncung dapat mengambil bagian dalam pembangunan DesaTuncung.
	2020			
5	Ersas A. Gahung, T.A.M.Ronny Gosal, Frans Singkoh	Peran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memberdayakan Pemuda Desa khususnya di Desa Liwutung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara telah berhasil membuat keadaan Desa Liwutung yang sebelumnya tidak kondusif menjadi kondusif, namun peran dari Dinas pemuda dan Olahraga sendiri belum maksimal terlihat belum adanya program yang menyentuh pemuda desa, sehingga pemuda desa merasa terabaikan dengan ketidakhadiran pemerintah di Desa. Perlu adanya pembentukan karang taruna yakni organisasi kepemudaan di desa untuk merangkul aspirasi pemuda desa dan
	2017			

				menfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan selain kegiatan keagamaan.
6	ventrio Gilbert Lantemona, Fanley Pangemanan, Neni Kumayas  2021	Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pemberdayaan generasi muda di Kabupaten	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian didapati Dalam proses pemberdayaan generasi muda yang dilakukan dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ternyata telah berjalan dengan baik, karena dalam pemberdayaan generasi muda yang ada dinas terkait melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada.
7	Ridho Anugerah, Aloysius Mering, Imma Fretisari  2014	Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengapresiasi Seniman Daerah Kabupaten Sambas 2008-2014	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini mendeskripsikan peranan DISPORABUDPAR dalam mengapresiasi seniman dan terdapat sejumlah permasalahan diantaranya adalah minimnya anggaran DISPORABUDPAR dalam menyelenggarakan program atau event-event, SDM aparatur DISPORABUDPAR bukan berlatar belakang serjana seni, DISPORABUDPAR tidak memiliki fasilitas secara khusus seperti gedung kesenian sehingga berpengaruh pada program kerja.



8	<p>Andryus Albert Barutu</p> <p>2020</p>	<p>Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Menciptakan Kepemimpinan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan kepemimpinan dilihat dari bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda, kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda, pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda, serta peran pemerintah daerah dalam pengembangan kepemimpinan pemuda memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena dari beberapa kategori pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut belum terlihat secara jelas lembaganya, sistem pendidikan kepemimpinan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru juga belum terlihat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013.</p>
9	<p>Muhammad Asyfat Sarangan</p>	<p>Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Prestasi Atlit</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan</p>

	2014	kempe di Provinsi Kalimantan Timur		Prestasi Atlit kempe di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta – fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi Atlit kempe Kalimantan Timur. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa cukup mengurangi motivasi Atlit dalam berprestasi yaitu seperti lambannya pencairan uang tunjangan Atlit, dan jaminan pekerjaan bagi Atlit berprestasi yang masih menganggur juga belum ada. Dalam upaya meningkatkan Prestasi Atlit di Provinsi Kalimantan Timur DISPORA Kaltim akan terus berusaha melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab menurut peraturan yang ada, serta senantiasa akan terus berusaha belajar memperbaiki dari segala faktor-faktor yang dirasa kurang dari Atlit guna mencapai target 3 besar pada PON 2016 di JABAR
10	Bayu, Pratama Putra	Pengangkatan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di Dinas	Deskriptif Kualitatif	Studi ini menemukan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga semakin aktif dalam melaksanakan kegiatan-

2016	Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya	kegiatan kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh dua bidang yang sangat berpengaruh dalam pengangkatan kegiatan di bidang Kesiswaan, Pemuda, Olahraga dan Pramuka (KESPOP) yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga serta bidang Kesiswaan dan Pramuka
------	--	---

## 2.5 Kerangka Pemikiran

**Bagan 2.5.1** Kerangka Pemikiran

